

Penerbitan Kepmendagri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP-el dan atau tanda pengenal lainnya 2. Surat Perjalanan Dinas dan Surat Perintah Tugas (bagi pengguna layanan dari pemerintah daerah) 3. Dokumen Pendukung: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat pencalonan. b. Surat pernyataan kesepakatan bersama antar Partai Politik peserta pemilihan dalam pencalonan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. c. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. d. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah. e. Fotocopy ijazah Sekolah Dasar sampai dengan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang. f. Fotocopy akta kelahiran/surat keterangan kenal lahir/KTP. g. Surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah tentang hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. h. Surat keterangan Ketua Pengadilan setempat bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih. i. Surat keterangan ketua pengadilan setempat bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. j. Surat pernyataan penyerahan daftar kekayaan pribadi. k. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<p>menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara.</p> <ol style="list-style-type: none"> l. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga yang menyatakan tidak sedang dinyatakan pailit. m. Surat keterangan kepolisian bahwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela. n. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak dan tanda terima surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi 5 tahun terakhir. o. Daftar riwayat hidup calon yang bersangkutan. p. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan yang sama. q. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai Penjabat Kepala Daerah. r. Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/ Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota. s. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah tentang penetapan hasil perolehan suara dan penetapan pasangan calon terpilih. t. Surat pengantar penyampaian berita acara penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. u. Surat pengantar hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. v. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang usulan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (periode sekarang). w. Surat dari Mahkamah Konstitusi mengenai tidak terdaftar adanya perkara yang menyangkut keberatan terhadap hasil perolehan suara. x. Surat pengantar dari Gubernur.
2.	Prosedur	Standar Operasional Prosedur layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Waktu Penyelesaian	11 (sebelas) hari kerja

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5.	Produk	Mengajukan Permohonan Layanan Administrasi melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email: ula@kemendagri.go.id 2. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635, (021) 3521468 3. Fax: (021) 3524583 4. Kotak saran 5. Petugas informasi dan pengaduan

